



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1278);

MEMUTUSKAN: ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Program Legislasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dalam rangka pengawasan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara Elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER						
1.	Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none">Laki-laki dan perempuan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif karena keduanya berhak memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam berbagai bidang pembangunan.Kesetaraan gender belum menjadi <i>mainstream mindset</i> di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif karena	Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none">Kemenko Bidang PMKKementerian Hukum dan HAMKementerian Sekretariat NegaraKementerian PPN/BappenasKementerian KeuanganKementerian Dalam NegeriAkademisiPakar/Ahli GenderLembaga Legislatif	2022	Dalam tahap penyempurnaan naskah akademik dan draft RUU



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		kurangnya pemahaman terhadap konsep kesetaraan gender dan hal ini belum diatur dalam tataran peraturan perundang-undangan.		<ul style="list-style-type: none">Lembaga Yudikatif		
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan Tahun 2023-2030	<ul style="list-style-type: none">Perlunya kebijakan afirmasi untuk membuka peluang dan percepatan bagi perempuan untuk memperoleh kesetaraan kesempatan di berbagai bidang yang salah satunya dalam bidang politik dan pengambilan keputusan, seperti pemberian kuota atau jumlah minimal 30% keterlibatan perempuan di pemilu.Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mempercepat kebijakan responsif gender di berbagai bidang	Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	<ul style="list-style-type: none">Kemenko Bidang PMKKementerian Sekretariat NegaraKementerian Dalam NegeriKementerian Hukum dan HAMKementerian PPN/BappenasKSPLembaga LegislatifLembaga Yudikatif	2022	Dalam tahap penyusunan konsepsi dan draft RPerpres karena akan diajukan melalui Izin Prakarsa ke Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		pembangunan.				
3.	Peraturan Menteri PPPA tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none">Berdasarkan data Komnas Perempuan sejak tahun 2009 s.d. 2018 terdapat 421 kebijakan yang diskriminatif (333 di antaranya menyangkut perempuan) dimana 56% berupa Peraturan Daerah dan sisanya dalam bentuk Surat Edaran Kepala Daerah.Permasalahan ini timbul antara lain karena ketiadaan perspektif gender di kalangan penyusun peraturan perundang-undangan terutama di tingkat pemerintah daerah, dimana salah satu indikator analisisnya adalah akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, sehingga diperlukan <i>tools</i> untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam peraturan perundang-	Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	<ul style="list-style-type: none">Kemenko Bidang PMKKementerian Hukum dan HAMKementerian PPN/BappenasKementerian Dalam NegeriKementerian KeuanganSekretariat Kabinet	2022	<ul style="list-style-type: none">Dalam tahap penyusunan draftPerlu persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		undangan yang akan disusun atau yang sudah jadi sehingga tidak bersifat diskriminatif atau bias gender.				
4.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender	<ul style="list-style-type: none">• Kesenjangan gender masih terjadi di beberapa bidang pembangunan salah satunya bidang ekonomi yang berkontribusi signifikan pada masih rendahnya nilai IPM perempuan.• Sesuai dengan tujuan ke-5 SDGs dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender maka upaya memberdayakan perempuan perlu didorong dan diperkuat karena kerentanan perempuan, salah satunya terkait kondisi ekonomi pada banyak kasus kekerasan menempatkan perempuan sebagai korban.	Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi.	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Bidang PMK• Kementerian Hukum dan HAM• Sekretariat Kabinet• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Keuangan• Kementerian Ketenagakerjaan• Kementerian KUKM	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan• Perlu persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
5.	Peraturan Menteri PPPA tentang Indeks Pengarusutamaan Gender	<ul style="list-style-type: none">• Indeks PUG adalah suatu alat untuk mengukur <i>output</i> dan <i>outcome</i> dari seluruh strategi kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan dalam rangka mencapai kesetaraan gender berdasarkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.• Indeks PUG ini akan menjelaskan terkait kondisi PUG di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta tingkat implementasi PUG apakah: Non APE, Pratama, Madya, Utama, dan Mentor.	Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Bidang PMK• Kementerian Hukum dan HAM• Sekretariat Kabinet• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Keuangan• Kementerian PPN/Bappenas	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap penyusunan draft• Perlu persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
6.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pusat Pembelajaran Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Kesenjangan gender masih terjadi di beberapa bidang pembangunan salah satunya bidang ekonomi yang berkontribusi signifikan pada masih rendahnya nilai IPM perempuan.• Dibutuhkan kebijakan yang mendukung agar status dan profil perempuan di berbagai bidang pembangunan meningkat antara lain melalui program/kegiatan Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN).• PUTARAN ini mempunyai skema pemberdayaan pada perempuan dalam bentuk SIAP (Suara Aksi Perempuan) di bidang prioritas, yakni SIAP Ekonomi, SIAP Politik, SIAP Hukum, SIAP <i>Leadership</i>, SIAP Lestari, SIAP Pintar, dan SIAP Sehat.	Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Bidang PMK• Kementerian Hukum dan HAM• Sekretariat Kabinet• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Keuangan• Kementerian PPN/Bappenas	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan• Perlu persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
7.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan <i>Microsave</i> Indonesia <i>Consulting</i> tentang Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Inklusi Ekonomi dan Inklusi Keuangan Digital	<ul style="list-style-type: none">• Dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan perempuan melalui inklusi ekonomi dan inklusi keuangan digital, dibutuhkan dasar hukum untuk mengimplementasikan akselerasi keuangan digital yang responsif gender dan inklusif melalui program dan inisiatif pemberdayaan ekonomi perempuan.• Ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui inklusi ekonomi dan inklusi keuangan digital.	Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	<i>Microsave</i> Indonesia <i>Consulting</i>	2022	Sudah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 28 Februari 2022
8.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemenko Bidang Perekonomian dengan Kemen PPPA tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">• Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024 (RAN KSB) memberikan mandat kepada 14	Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Tim Pelaksana RAN Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024• Kemenko Bidang Perekonomian	2022	Sudah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 11 Maret 2022



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	<p>Kementerian/Lembaga serta 26 provinsi penghasil sawit yang dalam pelaksanaannya RAN KSB didorong untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk unsur swasta serta masyarakat sipil.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebagai upaya menghadirkan perkelapasawitan nasional yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan yang responsif gender.		<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pertanian• UNDP		
9.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Pusat Investasi Pemerintah tentang Pengembangan Usaha Mikro Berperspektif Gender melalui Pemberdayaan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none">• Dalam rangka pengembangan usaha mikro berperspektif gender melalui pembiayaan usaha mikro serta penyebaran program kesetaraan gender dan perlindungan anak.• Sebagai pedoman dalam Pembiayaan usaha mikro.	Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi			Dalam tahap penyusunan draft



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
10.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Sekolah Seniman Pangan tentang Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif	Adanya kebutuhan untuk meningkatkan sinergi dan produktivitas perempuan pelaku usaha khususnya kewirausahaan di bidang agrobisnis.	Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	Sekolah Seniman Pangan	2022	Dalam tahap penyusunan draft

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK						
11.	Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Perkawinan	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.• Dengan ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka diperlukan payung hukum tentang dispensasi perkawinan pada saat sebelum, selama, dan	Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Mahkamah Agung• Kepolisian Negara RI• Kementerian Koordinator Bidang PMK• Kementerian Sekretariat Negara• Kementerian Agama• Kementerian Kesehatan• Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2022	Dalam tahap pengesahan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		setelah pengajuan baik permohonan dikabulkan atau ditolak.		<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Sosial• Kementerian Komunikasi dan Informatika• KPAI		
12.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak	Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan penataan tugas alat kelengkapan, dan penguatan kode etik penyelenggaraan forum anak sehingga perlu diubah.	Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan HAM• Sekretariat Kabinet• Kementerian Dalam Negeri• KPAI• Forum Anak	2022	Sudah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak pada tanggal 3 Januari 2022
13.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak	Perlu pengubahan pasal mengenai persyaratan pengurus forum anak.	Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan HAM• Sekretariat Kabinet• Kementerian Dalam Negeri• KPAI• Forum Anak	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap penyusunan draft• Perlu persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
14.	Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Untuk melaksanakan delegasi Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan diperlukan simplifikasi terhadap 8 (delapan) Peraturan Menteri PPPA mengenai KLA yang telah ada sebelumnya.• Sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan dan program Kabupaten/Kota Layak Anak	Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian PPN/Bappenas• Kementerian Koordinator Bidang PMK• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Sekretariat Negara• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Perhubungan• KPAI	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap penyusunan draft• Perlu persetujuan Presiden
15.	Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Perpustakaan Nasional tentang Pengembangan Informasi Layak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Pada era digital saat ini memungkinkan anak mengakses informasi yang tidak layak dan tidak sesuai dengan perkembangan usia kematangannya sehingga	Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Komunikasi dan Informatika• Perpustakaan Nasional	2022	Dalam tahap perencanaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Digital	<p>dibutuhkan sistem filtrasi berlapis baik dari keluarga, masyarakat, dan negara.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam rangka filtrasi tersebut, Kemen PPPA telah menerapkan program Informasi Layak Anak melalui Pusat Informasi Sahabat Anak yang membutuhkan sinergi lintas Kementerian/Lembaga termasuk Kemen Koinfo dan Perpunas untuk mewujudkannya tidak hanya di ranah luring tetapi juga ranah daring.				
16.	Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama tentang Rumah Ibadah Ramah Anak (Gereja Kristen Ramah Anak dan	<ul style="list-style-type: none">• Belum banyak gereja yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak yang menghargai hak-hak anak serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.• Pada umumnya gereja hanya digunakan pada	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama• Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama	2022	Dalam tahap perencanaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Gereja Katolik Ramah Anak)	waktu beribadah dan sekolah minggu, banyak ruangan dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak di lingkungan gereja untuk mengisi waktu luang mereka dengan berbagai aktivitas yang positif.				
17.	Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pelarangan Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok dalam Media Elektronik	<ul style="list-style-type: none">• Masih banyaknya iklan, promosi, dan sponsor rokok di media elektronik.• Memenuhi hak kesehatan anak dan melindunginya dari penggunaan rokok.	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2022	Dalam tahap perencanaan
18.	Perpanjangan Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Agama dan Dewan Masjid Indonesia tentang Masjid Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none">• Kesepahaman Bersama yang sudah berjalan sangat baik dan perlu dilanjutkan.• Belum banyak masjid yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak yang menghargai hak-hak anak serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agama• Dewan Masjid Indonesia	2022	Dalam tahap perencanaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>dan diskriminasi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pada umumnya masjid hanya digunakan pada waktu sholat saja, banyak ruangan dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak di lingkungan masjid untuk mengisi waktu luang mereka dengan berbagai aktivitas yang positif.				
19.	Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Agama dan Dewan Masjid Indonesia tentang Masjid Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none">• Perjanjian Kerja Sama yang sudah berjalan sangat baik dan perlu dilanjutkan.• Belum banyak masjid yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak yang menghargai hak-hak anak serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.• Pada umumnya masjid hanya digunakan pada waktu sholat saja, banyak ruangan dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agama• Dewan Masjid Indonesia	2022	Dalam tahap perencanaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		anak-anak di lingkungan masjid untuk mengisi waktu luang mereka dengan berbagai aktivitas yang positif.				
20.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tentang Penyusunan Perlindungan Anak dalam Dispensasi Kawin dan Perlindungan Perempuan Pasca Perceraian	<ul style="list-style-type: none">• Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang menyebutkan “Hakim dapat meminta rekomendasi pemberian Dispensasi Kawin kepada psikolog di antaranya P2TP2A”.• Dari 197 layanan Puspaga, beberapa di antaranya telah melakukan MoU dengan Pengadilan Agama untuk sosialisasi, edukasi, dan pemberian layanan konseling anak dan orang tua untuk pencegahan perkawinan usia anak dalam pengajuan	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung	2022	Dalam tahap penyusunan draft



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		permohonan dispensasi kawin dan perlindungan perempuan pasca perceraian. <ul style="list-style-type: none">• Hasilnya para pemohon tersebut menunda bahkan membatalkan rencana perkawinan usia anak.				

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT						
21.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA	<ul style="list-style-type: none">• Untuk mewujudkan kualitas keluarga yang terdiri dari kualitas legalitas struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya diperlukan berbagai sektor dalam sinergitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berperspektif gender	Asdep Peningkatan Partisipasi Keluarga	<ul style="list-style-type: none">• BKKBN• Kemensos• Kemenkes• Kemenag• Kemenpora• Kemen KUKM• Kemendikbud• Kemendagri• Kemen PUPERA• Kemenkumham• Kemen Desa, PDT, dan Transmigrasi• Sekretariat Kabinet	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap harmonisasi• Perlu persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		dan hak anak. • Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan belum mengakomodasi pembentukan atau perubahan struktur organisasi pemerintahan di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota sehingga perlu diganti.				

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN						
22.	Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO Tahun 2020-2024	Tindak lanjut dari rapat koordinasi GT PP TPPO Pusat pada tanggal 27 Januari 2020 bahwa masa berlaku RAN PP TPPO Tahun 2014-2019 sudah habis sehingga perlu disusun RAN	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko PMK• Kemenaker• Kemendikbud• Kemensos• Kemenkominfo• Kemendes• Kemenparekraf	2022	Dalam tahap pengesahan oleh Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		PP TPPO yang baru.		<ul style="list-style-type: none">• Kemenlu• Kemendagri• Kemenkumham• Kemenkes• LPSK• Bareskrim Polri• BP2MI• PPATK• KPAI• Kejaksaan Agung• Mahkamah Agung		
23.	Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Memuat tentang latar belakang dan tantangan kondisi kekerasan di Indonesia, rencana aksi, strategi, dan koordinasi layanan bagi perempuan korban kekerasan.• Strategi yang dilakukan meliputi: pencegahan, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan, penyedia layanan, sistem pencatatan dan pelaporan, penegakan hukum, koordinasi pemantauan evaluasi.	Asdep Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Bidang PMK• Kemenko Bidang Polhukam• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Luar Negeri• Kementerian Keuangan• Kementerian Agama• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Sekretariat Negara• Kementerian Ketenagakerjaan• Kementerian Sosial	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap penyusunan draft• Sudah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2021



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kesehatan• Kepolisian Negara Republik Indonesia• Kejaksaan Republik Indonesia• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban• Badan Pelindungan Pekerja Migran• Komnas HAM• Komnas Perempuan		
24.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none">• Setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia.• Untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak dalam mendapatkan	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Bidang PMK• Kementerian Hukum dan HAM• Sekretariat Kabinet• Kemenaker• Kemendagri• Kemenlu• Polri	2022	Sudah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 20 Januari 2022



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi maka diperlukan standar layanan perlindungan perempuan dan anak.				
25.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pelindungan Perempuan Pekerja Migran	Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko PMK• Kemenaker• Kemendagri• Kemenlu• Polri• BP2MI	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap harmonisasi• Perlu persetujuan Presiden
26.	Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial serta penyusunan data perempuan dan anak terdampak konflik sosial secara periodik.	Asdep Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Bidang PMK• Kementerian Hukum dan HAM• Sekretariat Kabinet• Kemendagri• Kementerian Sosial• KPAI	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan• Perlu persetujuan Presiden
27.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standardisasi Rumah Perlindungan	Untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Bidang PMK• Kementerian Hukum dan HAM	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan• Perlu persetujuan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pekerja Perempuan	pekerja/buruh dan pegawai perempuan yang optimal, perlu dilakukan standardisasi bagi Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan sehingga diharapkan terbentuk lembaga layanan yang memenuhi standar kesesuaian serta meningkatkan kualitas dari lembaga layanan tersebut.	Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none">• Sekretariat Kabinet• Kemnaker• Kemenkes• Kemensos• Kemendagri• Kemenlu• BP2MI• Serikat Pekerja• Organisasi Kemasyarakatan Pemerhati Pekerja Perempuan		Presiden
28.	Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas	Sebagai acuan bagi masyarakat dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis Masyarakat dan Komunitas, perlu disusun petunjuk teknis yang mengatur pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas.	Asdep Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Bidang PMK• Kementerian Hukum dan HAM• Sekretariat Kabinet• Kemnaker• Kemenkes• Kemensos• Kemendagri• Kemenlu• BP2MI• Serikat Pekerja• Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam pencegahan	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan• Perlu persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				TPPO		
29.	Peraturan Menteri PPPA tentang Prosedur Standar Operasional Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan	Sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO dalam layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang membutuhkan dukungan dan koordinasi di tingkat nasional, koordinasi antar provinsi, antar negara dan antar instansi secara multisektoral sesuai kebutuhan korban dengan syarat dan ketentuan yang berlaku termasuk apabila korban bukan berkewarganegaraan Indonesia.	Asdep Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Bidang PMK• Kementerian Hukum dan HAM• Sekretariat Kabinet• Kemnaker• Kemenkes• Kemensos• Kemendagri• Kemenlu• LPSK• BP2MI• Bareskrim Polri• Dinas PPPA	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan• Perlu persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
30.	Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak	Disusun dalam rangka mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan terhadap anak secara sistematis, terintegrasi, berbasis bukti, terkoordinasi, partisipatoris, dan berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak.	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Sekretariat Negara• Kemenkumham• Kemenaker• Kemenkes• Kemenlu• Kemensos• Kejaksaan RI• Polri• BKKBN• KPAI	2022	Dalam tahap pengesahan oleh Presiden
31.	Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring	<ul style="list-style-type: none">• RPJMN 2020-2024.• Sebagai Acuan/Peta Jalan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus.	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none">• Bappenas• Kemenkumham• Kejaksaan RI• Kemensos• Kemenag• Kemensetneg• Kemenkes• Kemendikbud• Kemen Kominfo• Kemenko Bidang PMK	2022	Dalam tahap penyusunan konsepsi dan draft RPerpres karena akan diajukan melalui Izin Prakarsa ke Presiden
32.	Peraturan Menteri PPPA tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan	Untuk melaksanakan delegasi Pasal 10 PP Nomor 59 Tahun 2019.	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian PPN/Bappenas• Kementerian Hukum dan	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap pengesahan• Perlu persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Penyelenggaraan Perlindungan Anak		Anak	HAM • Kejaksaan RI • Kemensos • Kemenag • Kemen Setneg • Kemenkes • Kemendikbud • Kemen Kominfo • BNPB • Kemendagri • Kemendes • Kemenko Bidang PMK		
33.	Peraturan Menteri PPPA tentang Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Untuk melaksanakan delegasi Pasal 15 PP Nomor 59 Tahun 2019.	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	• Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian Hukum dan HAM • Kejaksaan RI • Kemensos • Kemenag • Kemen Setneg • Kemenkes • Kemendikbud • Kemen Kominfo • BNPB • Kemendagri • Kemendes	2022	• Dalam tahap pengesahan • Perlu persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none">• Kemenko PMK		
34.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pengarusutamaan Isu Pekerja Anak dalam Program/Kegiatan di Kementerian/Lembaga dan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Menindaklanjuti 5 (lima) arahan Presiden, salah satunya penurunan pekerja anak.• Prosentase pekerja anak tahun 2019 usia 10-17 tahun sebesar 6,35%.	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Bidang PMK• Kementerian Hukum dan HAM• Sekretariat Kabinet• Kemenaker• Kemensos• Kemenkes• Kemenag• Kemendikbud• Kemen Kominfo• Kementerian PPN/Bappenas• KPAI• Dinas PPPA	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan• Perlu persetujuan Presiden
35.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standar Layanan AMPK/KTA pada Unit SAPA 129	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA memberikan tugas dan fungsi tambahan untuk memberikan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Bidang PMK• Kementerian Hukum dan HAM• Sekretariat Kabinet• Kemenaker• Kemensos• Kemenkes• Kemenag• Kemendikbud• Kemen Kominfo	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan• Perlu persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none">• Kementerian PPN/Bappenas• KPAI• Dinas PPPA		
36.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak	Melaksanakan mandat UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Bidang PMK• Kementerian Hukum dan HAM• Sekretariat Kabinet• Kemenaker• Kemensos• Kemenkes• Kemenag• Kemendikbud• Kemen Kominfo• Kementerian PPN/Bappenas• KPAI	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan• Perlu persetujuan Presiden
37.	Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA, Kementerian Agama, dan Densus 88 Polri tentang Perlindungan Anak Korban Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme	Dibutuhkan pencegahan dan penanganan secara cepat dan terpadu terhadap anak korban radikalisme dan tindak pidana terorisme.	Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agama• Densus 88 Polri	2022	Dalam tahap perencanaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
INSPEKTORAT						
38.	Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang PPPA	Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun NSPK yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang PPPA.	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan HAM• Sekretariat Kabinet• Kemenko Bidang PMK• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Sosial• Kementerian Kesehatan• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi• Kementerian PPN/Bappenas	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap pra harmonisasi• Perlu persetujuan Presiden
39.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kemen PPPA	Untuk melaksanakan Instruksi Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kemen PPPA perlu disusun Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian PANRB	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap penyusunan draft• Tidak memerlukan persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		dan Melayani di Lingkungan Kemen PPPA				

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO DATA DAN INFORMASI						
40.	Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Satu Data Gender dan Anak	Untuk menindaklanjuti mandat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Revisi Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.	Biro Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none">• Pembina Data Tingkat Pusat• Sekretariat Satu Data Indonesia• Dinas PPPA	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan• Perlu persetujuan Presiden
41.	Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Pemanfaatan Kependudukan dan KTP Elektronik	Kesepahaman Bersama periode sebelumnya telah habis masa berlakunya.	Biro Data dan Informasi	Kementerian Dalam Negeri	2022	Dalam tahap penyusunan draft
42.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kemen	Sebagai tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama	Biro Data dan Informasi	Direktorat Jenderal Kependudukan dan	2022	Dalam tahap perencanaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	PPPA dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Kemen PPPA	antara Kemen PPPA dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Pemanfaatan Kependudukan dan KTP Elektronik.		Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri		
43.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kemen PPPA dengan UNICEF tentang Pengembangan Aplikasi Simfoni PPA V.3.0 Berbasis Manajemen Kasus	Penyesuaian aplikasi Simfoni PPA dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.	Biro Data dan Informasi	UNICEF	2022	Dalam tahap penyusunan draft

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
44.	Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana	Sebagai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan perlindungan	Biro Perencanaan dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Hukum dan HAMKementerian Dalam Negeri	2022	<ul style="list-style-type: none">Dalam tahap perencanaanPerlu persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023	perempuan dan anak tahun anggaran 2023		<ul style="list-style-type: none">• Kementerian PPN/Bappenas• Kementerian Keuangan• Dinas PPPA		

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT						
45.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kemen PPPA	Penyesuaian mengenai mekanisme SOP penyusunan peraturan perundang-undangan atau produk hukum dan SOP tata cara kerja sama di Lingkungan Kemen PPPA	Layanan Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Hukum dan HAM	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap penyusunan draft• Tidak memerlukan persetujuan Presiden
46.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Untuk menindaklanjuti mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas	Layanan Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Sosial• Kementerian Kesehatan• Kementerian Komunikasi dan Informatika• Pemerintah Daerah	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap penyusunan draft• Perlu persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak				

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO SDM DAN UMUM						
47.	Peraturan Menteri PPPA tentang Peta Proses Bisnis Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none">• Untuk meningkatkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kemen PPPA perlu ditambahkan peta lintas fungsi untuk proses pendukung.• Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kemen PPPA sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian PANRB	2022	Sudah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kemen PPPA pada tanggal 18 Februari 2022



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
48.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none">• Adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan sehingga dilakukan evaluasi terhadap sifat, jenis, dan beban kerja kelas jabatan di lingkungan Kemen PPPA.• Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA perlu disesuaikan dengan persetujuan dari Kementerian PANRB.	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian PANRB• Kementerian Keuangan	2022	Sudah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA pada tanggal 23 Februari 2022
49.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none">• Untuk mengoptimalkan pengukuran kinerja dan produktivitas kerja pegawai Kemen PPPA.• Perlu dilakukan penyesuaian terhadap tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai Kemen PPPA, yang semula berdasarkan kehadiran menjadi berdasarkan	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Keuangan	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap penyusunan draft• Tidak memerlukan persetujuan Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		kinerja.				
50.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pemberian Penghargaan bagi PNS di Lingkungan Kemen PPPA	Mengatur pemberian penghargaan kepada pegawai dengan kategori: satya lencana karya satya, anumerta, pegawai yang pensiun karena cacat, pegawai yang pensiun, dan pegawai berpretasi.	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian PANRB• Kementerian Keuangan• BKN	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan• Tidak memerlukan persetujuan Presiden
51.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Kemen PPPA	Penambahan substansi mengenai rencana suksesi.	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian PANRB• BKN	2022	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan• Tidak memerlukan persetujuan Presiden

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI